

Implementasi Website Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen Kota Serang

Aditiya Manufi¹, Suflani², Nida Aeni Muflihah³, Zaki Abdul Rahman⁴, Maria Miselsia Wonga Mbu⁵,
Nailah Lisna Oktaviana⁶, Dina Dwi Apriani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia

Program Ilmu Komputer, fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa

Program Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

*e-mail : aditazlh@gmail.com¹, suflani0780@gmail.com², nidaaeni26@gmail.com³ Zaki Abdul Rahman⁴,
Maria Miselsia Wonga Mbu⁵, Nailah Lisna Oktaviana⁶, Dina Dwi Apriani⁷

Abstract

The digital transformation of public services has become an important strategy to improve the quality, effectiveness, and transparency of government services. However, administrative services at the village level are still dominated by conventional procedures that require residents to visit the village office directly. This community service program aimed to develop and implement a community service website at Mesjid Priyayi Village, Kasemen District, Serang City, to improve the accessibility and efficiency of public services. The implementation method consisted of needs assessment, website design and development, system testing, training for village officials, and mentoring during implementation. The website provides several features, including village profiles, public information, administrative service requests, downloadable forms, complaint services, and activity documentation. The results indicate that the implementation of the website has improved access to public information, accelerated administrative services, enhanced the digital competence of village officials, and increased community satisfaction with public services. Furthermore, the website has become an effective communication medium between the village government and the community. It is expected that the sustainability of this program will support the realization of digital-based public services that are efficient, transparent, and responsive to community needs.

Keywords: community service; public service; village website; digital transformation; e-government

Abstrak

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan transparansi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, pelayanan administrasi di tingkat kelurahan masih didominasi oleh proses konvensional yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor kelurahan sehingga pelayanan menjadi kurang efisien. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan website pelayanan masyarakat di Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan dan pengembangan website, uji coba sistem, pelatihan kepada perangkat kelurahan, serta pendampingan implementasi. Website yang dikembangkan menyediakan berbagai fitur, antara lain profil kelurahan, informasi publik, pengajuan layanan administrasi, unduhan formulir, layanan pengaduan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi website mampu meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan administrasi, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kemampuan aparatur kelurahan dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, website menjadi media komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi website pelayanan masyarakat di Kelurahan Mesjid Priyayi diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: pengabdian kepada masyarakat; pelayanan publik; website kelurahan; transformasi digital; e-government.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan informasi dan proses pelayanan disampaikan melalui kanal yang lebih mudah dijangkau. Dalam konteks pemerintahan lokal, website dapat berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan pendukung pelayanan administrasi. Transformasi tersebut menjadi penting karena masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif.

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, hak masyarakat, partisipasi masyarakat, dan pengaduan sebagai bagian penting dari tata kelola pelayanan. Dengan demikian, inovasi pelayanan berbasis teknologi perlu diarahkan bukan sekadar pada penggunaan aplikasi, tetapi pada peningkatan manfaat yang diterima masyarakat.

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kebijakan tersebut mendorong layanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada pengguna. Portal pelayanan publik berbasis elektronik juga diarahkan untuk memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.

Pada tingkat kelurahan, kebutuhan digitalisasi sangat dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Informasi mengenai profil wilayah, pengumuman, prosedur pelayanan, formulir administrasi, pengaduan, dan dokumentasi kegiatan perlu tersedia dengan cara yang mudah dipahami. Ketika informasi hanya tersedia secara langsung di kantor kelurahan, masyarakat perlu meluangkan waktu untuk datang bahkan untuk kebutuhan yang sebenarnya dapat diselesaikan pada tahap awal secara daring.

Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian karena terdapat kebutuhan untuk meningkatkan akses informasi dan efisiensi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi. Berdasarkan sumber kegiatan, pelayanan administrasi masih didominasi proses konvensional yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor kelurahan. Kondisi tersebut menjadi dasar pengembangan website pelayanan masyarakat.

Website yang dikembangkan diarahkan untuk menyediakan profil kelurahan, informasi publik, pengajuan layanan administrasi, unduhan formulir, layanan pengaduan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan. Fitur tersebut dirancang agar website tidak berhenti sebagai halaman informasi, tetapi menjadi media pendukung proses pelayanan dan komunikasi pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Program pengabdian ini memiliki dua sisi manfaat. Bagi masyarakat, website diharapkan mempermudah akses informasi dan layanan. Bagi aparatur, website menjadi sarana

untuk meningkatkan kompetensi digital dan membantu pengelolaan informasi secara lebih terstruktur. Dengan demikian, intervensi teknologi diharapkan menghasilkan perubahan proses pelayanan yang dapat dipertahankan setelah kegiatan pengabdian selesai.

Tujuan kegiatan adalah mengembangkan dan mengimplementasikan website pelayanan masyarakat di Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Tujuan khususnya meliputi: (1) mengidentifikasi kebutuhan informasi dan pelayanan; (2) menyediakan media layanan digital; (3) meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola website; (4) memperluas akses informasi; dan (5) membangun kanal komunikasi dan pengaduan masyarakat.

Permasalahan Mitra

Permasalahan utama yang menjadi dasar kegiatan adalah masih dominannya prosedur pelayanan konvensional. Masyarakat perlu datang ke kantor kelurahan untuk memperoleh informasi atau memulai kebutuhan administrasi tertentu. Dari sisi aparatur, informasi pelayanan juga belum terpusat dalam satu kanal digital. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan terhadap media yang dapat menyederhanakan akses awal pelayanan tanpa menghilangkan pelayanan tatap muka yang tetap diperlukan untuk proses tertentu.

Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan dan implementasi website pelayanan masyarakat yang memusatkan informasi dan beberapa akses awal layanan dalam satu media. Solusi dilengkapi dengan uji coba, pelatihan aparatur, dan pendampingan sehingga sistem dapat dipahami dan dikelola oleh mitra.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan pengembangan sistem berbasis kebutuhan mitra. Tahapan utama yang digunakan adalah identifikasi kebutuhan, perancangan dan pengembangan website, uji coba sistem, pelatihan perangkat kelurahan, dan pendampingan implementasi. Tahapan tersebut mengikuti kerangka kegiatan pada abstrak sumber dan diperluas dengan evaluasi keberlanjutan sebagai tahap tindak lanjut.



Gambar 1. Diagram alur metode pelaksanaan pengabdian

Tahap Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk memahami kondisi pelayanan yang berjalan, kebutuhan informasi masyarakat, kebutuhan aparatur, serta jenis fitur yang diperlukan. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan struktur menu dan prioritas fitur website. Identifikasi dilakukan melalui komunikasi dengan mitra, pengamatan terhadap proses pelayanan, dan pemetaan kebutuhan informasi.

Tahap Perancangan dan Pengembangan

Tahap pengembangan menerjemahkan kebutuhan mitra menjadi struktur website. Struktur minimal mencakup halaman profil, informasi publik, layanan administrasi, formulir, pengaduan, dan dokumentasi. Prinsip yang digunakan adalah sederhana, mudah dinavigasi, dan dapat diperbarui oleh aparatur. Pada tahap ini dilakukan penyiapan konten, struktur menu, serta fungsi pelayanan.



Gambar 2. Perancangan Website

Tahap Uji Coba

Uji coba dilakukan sebelum implementasi untuk memastikan menu dan fungsi dapat digunakan sesuai tujuan. Pengujian diarahkan pada akses halaman, navigasi, informasi publik, formulir, pengaduan, dan dokumentasi. Temuan uji coba menjadi dasar perbaikan sistem.

Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan diberikan kepada perangkat kelurahan yang akan menjadi pengelola. Materi meliputi pengenalan dashboard atau area pengelolaan, pembaruan konten, pengelolaan informasi layanan, dokumentasi, dan pengaduan. Setelah pelatihan dilakukan pendampingan agar aparatur dapat menggunakan sistem secara mandiri.



Gambar 3. Pelatihan dan Pendampingan

Analisis Data dan Evaluasi

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data berasal dari hasil identifikasi kebutuhan, observasi proses pelayanan, uji coba sistem, respons aparatur selama pelatihan, serta hasil pendampingan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi pelayanan sebelum dan sesudah website digunakan pada aspek akses informasi, akses layanan, efisiensi, kompetensi aparatur, komunikasi, dan kepuasan masyarakat.

Tabel 1. Tahapan, Aktivitas, Output, dan Indikator

No.	Tahap	Aktivitas	Output/Indikator
1	Identifikasi kebutuhan	Pemetaan masalah, kebutuhan fitur, kebutuhan informasi	Kebutuhan mitra terdokumentasi
2	Perancangan & pengembangan	Struktur menu, konten, fitur pelayanan	Website sesuai kebutuhan
3	Uji coba	Pemeriksaan fungsi dan navigasi	Fitur dapat digunakan
4	Pelatihan	Pelatihan pengelolaan website	Aparatur mampu menggunakan sistem
5	Pendampingan	Bimbingan implementasi dan pemecahan kendala	Penggunaan sistem berlanjut
6	Evaluasi	Analisis manfaat dan kebutuhan pengembangan	Rekomendasi keberlanjutan

Tabel 2. Instrumen Evaluasi Kegiatan

Aspek	Indikator	Sumber Data	Analisis
Akses informasi	Kemudahan memperoleh profil, berita, dan informasi pelayanan	Observasi & umpan balik pengguna	Deskriptif
Akses layanan	Kemudahan mengakses informasi/formulir layanan	Uji coba & observasi	Deskriptif
Efisiensi	Pengurangan kebutuhan kunjungan untuk informasi awal	Perbandingan proses	Deskriptif
Kompetensi aparatur	Kemampuan mengelola konten dan layanan	Observasi pelatihan	Deskriptif
Komunikasi	Kemudahan penyampaian informasi/pengaduan	Observasi fitur	Deskriptif
Kepuasan	Respons masyarakat terhadap kemudahan layanan	Umpan balik	Deskriptif; kuantitatif disarankan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi menghasilkan kebutuhan terhadap media pelayanan yang dapat diakses tanpa harus selalu datang langsung ke kantor kelurahan. Kebutuhan utama meliputi penyediaan informasi profil, informasi publik, akses administrasi, formulir, pengaduan, dan dokumentasi. Hasil pemetaan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi fitur website.

Kebutuhan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan di tingkat kelurahan tidak harus dimulai dari sistem yang kompleks. Prioritas awal dapat diberikan pada informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat dan proses yang dapat dipindahkan ke kanal digital. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa teknologi benar-benar menjawab masalah mitra.

Struktur dan Fitur Website

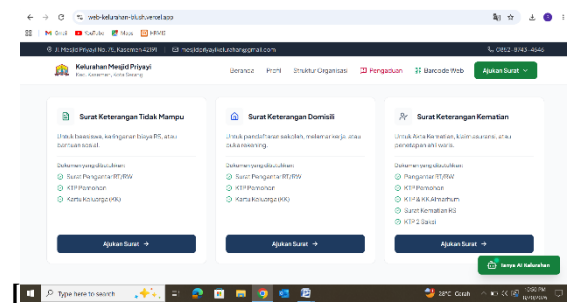
Website yang diimplementasikan menyediakan enam kelompok fungsi utama: profil kelurahan, informasi publik, layanan administrasi, unduhan formulir, pengaduan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan. Fitur tersebut sesuai dengan uraian sumber kegiatan.

Fitur	Fungsi Utama	Manfaat bagi Masyarakat	Manfaat bagi Aparatur
Profil	Informasi dasar kelurahan	Mengenal wilayah dan pemerintahan	Pusat informasi resmi
Informasi publik	Pengumuman/informasi	Akses informasi lebih cepat	Distribusi informasi terpusat
Layanan administrasi	Informasi/pengajuan layanan	Mengurangi tahapan awal tatap muka	Membantu standarisasi informasi
Formulir	Unduh formulir	Formulir tersedia sebelum datang	Mengurangi permintaan formulir manual
Pengaduan	Penyampaian keluhan/aspirasi	Kanal komunikasi	Dokumentasi masukan
Dokumentasi	Kegiatan kelurahan	Transparansi kegiatan	Arsip publikasi

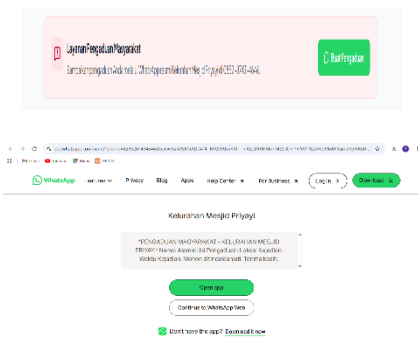
Implementasi Fitur Pelayanan

Implementasi fitur pelayanan memperluas fungsi website dari media informasi menjadi media pendukung proses pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai layanan dan formulir sebelum melakukan proses lanjutan. Bagi aparatur, keberadaan informasi terstruktur membantu mengurangi perbedaan informasi yang diberikan secara lisan.

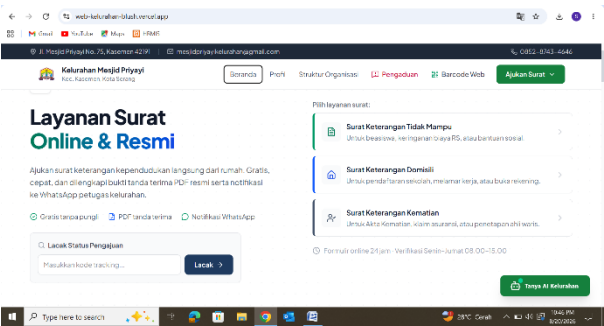
Pada sisi komunikasi, fitur pengaduan memberikan kanal untuk menerima masukan masyarakat. Fitur dokumentasi dapat digunakan untuk memperlihatkan aktivitas pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, website mempunyai fungsi komunikasi dua arah secara lebih kuat dibandingkan media informasi satu arah.



Gambar 5. Tampilan layanan administrasi dan formulir



Gambar 4. Tampilan fitur pengaduan masyarakat



Gambar 4. Tampilan halaman utama website pelayanan masyarakat

Evaluasi Hasil Implementasi

Evaluasi menunjukkan perubahan positif pada akses informasi, kemudahan layanan administrasi, kemampuan aparaturnya menggunakan teknologi, dan komunikasi dengan masyarakat. Sumber kegiatan juga melaporkan peningkatan kepuasan masyarakat.

3.5 Tabel Evaluasi Capaian Program

No	Indikator Keberhasilan	Kondisi Awal	Hasil Implementasi	Status
1	Ketersediaan informasi	Informasi banyak diperoleh langsung	Informasi tersedia melalui website	Tercapai
2	Akses layanan administrasi	Dominan datang langsung	Akses informasi layanan/formulir secara digital	Tercapai
3	Ketersediaan formulir	Mengandalkan pengambilan langsung	Formulir dapat diunduh	Tercapai
4	Kanal pengaduan	Komunikasi konvensional	Tersedia fitur pengaduan	Tercapai
5	Dokumentasi kegiatan	Tidak terpusat secara digital	Dokumentasi dapat dipublikasikan	Tercapai
6	Kompetensi aparatur	Perlu penguatan pemanfaatan teknologi	Mendapat pelatihan dan pendampingan	Meningkat
7	Kepuasan masyarakat	Belum terukur secara kuantitatif	Dilaporkan meningkat secara deskriptif	Positif

Pembahasan: Efisiensi Pelayanan

Website memberikan peluang pengurangan aktivitas administratif yang bersifat repetitif, terutama penyampaian informasi awal dan distribusi formulir. Masyarakat dapat mengetahui persyaratan dan menyiapkan dokumen sebelum datang ke kantor kelurahan. Dengan demikian, pelayanan tatap muka dapat lebih fokus pada tahapan yang memang membutuhkan verifikasi atau interaksi langsung.

Pembahasan: Kompetensi Aparatur

Pelatihan dan pendampingan merupakan komponen penting karena keberlanjutan website bergantung pada kemampuan aparatur dalam mengelola konten. Penguatan kompetensi digital juga memastikan website tidak berhenti sebagai produk teknologi, melainkan menjadi bagian dari proses kerja kelurahan.

Pembahasan: Transparansi dan Komunikasi

Informasi publik, dokumentasi kegiatan, dan pengaduan membentuk ekosistem komunikasi yang lebih terbuka. Hal ini mendukung prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dalam kerangka SPBE, pengembangan layanan elektronik perlu berorientasi pada pengguna dan peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.

Kesesuaian dengan SPBE

Implementasi website pelayanan masyarakat memiliki keterkaitan dengan arah SPBE. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Regulasi tersebut juga mengarahkan pengembangan layanan agar berorientasi kepada pengguna serta mendorong portal pelayanan publik berbasis elektronik.

Pada tingkat kelurahan, website yang dikembangkan dalam kegiatan ini dapat dipandang sebagai langkah awal digitalisasi layanan lokal. Sistem belum dimaksudkan sebagai pengganti seluruh sistem pemerintahan daerah, melainkan sebagai media pendukung yang memperluas akses informasi dan pelayanan. Pengembangan selanjutnya perlu memperhatikan integrasi, keamanan, interoperabilitas, dan tata kelola data agar tidak menimbulkan sistem yang terpisah-pisah.

Faktor Pendukung

- Adanya kebutuhan nyata terhadap peningkatan akses pelayanan.
- Partisipasi perangkat kelurahan dalam proses pengembangan dan pelatihan.
- Ketersediaan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- Adanya pendampingan selama implementasi.
- Respons positif masyarakat terhadap kemudahan akses informasi dan layanan.

Faktor Penghambat dan Mitigasi

Faktor	Risiko	Mitigasi
Pembaruan konten	Informasi menjadi tidak mutakhir	Tetapkan admin dan jadwal pembaruan
Kompetensi digital	Ketergantungan pada tim pengembang	Pelatihan berkala dan panduan admin
Keamanan data	Kebocoran/akses tidak sah	Kontrol akses, backup, dan pembaruan keamanan
Akses internet	Sebagian masyarakat kesulitan mengakses	Pertahankan kanal pelayanan offline
Keberlanjutan	Website tidak terurus	Integrasikan ke tugas rutin kelurahan

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pelayanan. Kelurahan disarankan menetapkan penanggung jawab website, melakukan pembaruan informasi secara berkala, membuat prosedur pencadangan data, melakukan evaluasi penggunaan, dan mengembangkan fitur berdasarkan kebutuhan masyarakat. Evaluasi pengguna juga penting agar pengembangan berikutnya berbasis bukti.

Rekomendasi Pengembangan

Berdasarkan hasil pelaksanaan, beberapa pengembangan dapat dilakukan pada tahap berikutnya. Pertama, sistem dapat dilengkapi pelacakan status permohonan agar masyarakat mengetahui perkembangan layanan. Kedua, notifikasi dapat digunakan untuk memberikan informasi ketika terdapat perubahan status. Ketiga, statistik penggunaan dapat ditambahkan untuk membantu aparatur mengetahui fitur yang paling banyak digunakan. Keempat, evaluasi kepuasan masyarakat dapat dilakukan secara periodik menggunakan instrumen terstruktur.

Pengembangan juga perlu mempertimbangkan keamanan informasi. Data masyarakat yang masuk melalui layanan digital perlu dikelola berdasarkan prinsip minimalisasi data, pembatasan akses, pencadangan, dan perlindungan kredensial. Jika pada masa depan website terhubung dengan

sistem lain, diperlukan perencanaan integrasi dan tata kelola data yang lebih formal.

Model Keberlanjutan Program

Komponen	Kegiatan Rutin	Output
SDM	Penetapan admin dan pelatihan	Admin kompeten
Konten	Pembaruan informasi mingguan/bulanan	Informasi mutakhir
Teknologi	Backup, monitoring, pemeliharaan	Sistem tersedia
Pelayanan	Pemantauan permohonan/pengaduan	Respons lebih tertata
Evaluasi	Survei kepuasan dan analisis penggunaan	Dasar perbaikan
Pengembangan	Penambahan fitur berdasarkan kebutuhan	Layanan berkembang

Keterbatasan Kegiatan

Keterbatasan utama artikel ini adalah sumber awal yang tersedia berupa abstrak kegiatan, sehingga tidak menyediakan data kuantitatif terperinci mengenai jumlah pengguna, jumlah permohonan, waktu pelayanan sebelum-sesudah, skor kepuasan, atau hasil pengujian usability. Oleh karena itu, artikel tidak menyajikan angka yang tidak didukung sumber. Keterbatasan ini sekaligus menjadi peluang untuk melakukan evaluasi kuantitatif pada tahap pengembangan berikutnya.

KESIMPULAN

Implementasi website pelayanan masyarakat di Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang merupakan upaya digitalisasi pelayanan yang diarahkan untuk meningkatkan akses informasi, efisiensi pelayanan administrasi, kompetensi aparatur, dan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, perancangan dan pengembangan website, uji coba, pelatihan, dan pendampingan.

Website menyediakan fitur profil kelurahan, informasi publik, layanan administrasi, unduhan formulir, pengaduan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan manfaat positif berupa kemudahan akses informasi dan layanan, percepatan proses pelayanan, peningkatan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat yang dilaporkan secara deskriptif.

Keberlanjutan program memerlukan pengelolaan website secara rutin, penetapan aparatur pengelola, pembaruan informasi, pemeliharaan teknologi, pengamanan data, dan evaluasi berkala. Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada pelacakan status layanan, notifikasi, analitik penggunaan, evaluasi kepuasan kuantitatif, dan integrasi dengan sistem pemerintahan yang relevan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Universitas Bina Bangsa, khususnya Fakultas Ilmu Komputer, serta seluruh perangkat kelurahan dan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam identifikasi kebutuhan, pengembangan, uji coba, pelatihan, dan implementasi website pelayanan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jakarta, 2009.
- [2] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jakarta, 2018.
- [3] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," 2020.
- [4] I. G. J. E. Putra, M. A. P. Putra, and I. K. A. Juliana, "Perencanaan Masterplan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Desa Berbasis E-Government," INSERT: Information System and Emerging Technology Journal, vol. 1, no. 2, 2020.
- [5] W. G. S. Parwita, R. A. Mutiarani, and I. N. W. Adnyana, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web di Desa Kukuh Kerambitan," Widya Laksana, vol. 10, no. 1, 2021.
- [6] R. F. Helmi, A. D. Akmal, Y. Hanoselina, and A. Anindya, "Digitalisasi Nagari: Pengelolaan Website Pemerintahan Nagari Salimpaung," Widya Laksana, vol. 13, no. 1, 2024.